

ANALISIS SPASIAL RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) “PUSPITA” SEBAGAI URBAN RESILIENCE DI KELURAHAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Wira Fazri Rosyidin¹, Sri Giyanti², dan Siti Dahlia³

¹Dosen Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA, Jakarta, Indonesia

² Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA, Jakarta, Indonesia

³ Dosen Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA, Jakarta, Indonesia

Email: Wira_fazri@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Pembangunan Kota Layak Anak menjadi program Pemprov DKI Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017. Salah satu wujud dari pengejawantahan Kota Layak Anak melalui pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) disejumlah wilayah di DKI Jakarta. Pembangunan RPTRA juga diakibatkan banyaknya permasalahan sosial yang disebabkan penataan wilayah yang belum relevan, sehingga menghasilkan masalah-masalah turunan seperti kurang berkembangnya anak dalam interaksi sosial yang berdampak pada kualitas hidup di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta memberikan kebijakan dengan memutuskan pembuatan suatu ruang publik terpadu di sejumlah wilayah. RPTRA merupakan suatu langkah kebijakan dengan menyediakan ragam fasilitas dengan tujuan membuat area lingkungan ramah kepada anak, wanita dan lanjut usia. Keinginan terhadap pembangunan masyarakat dengan RPTRA untuk solusi bagi ketahanan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hasil dari pemetaan sosial dari pembangunan RPTRA dengan pendekatan analisis spasial dengan aspek teori ketahanan masyarakat. Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu *me-review* draf perencanaan pembangunan pemerintahan daerah DKI dengan melihat tata ruang dari tingkat nasional hingga tingkat kota.

Katakunci: RPTRA, Ketahanan, dan Keruangan.

ABSTRACT:

In this paper will be describe of spatial analysis as resilience of urban. For the object of research is the RPTRA “Puspita” in one of place in Jakarta Area’s. Most of area in Jakarta is slump category within management of spatial plan in daily have some problems like us traffic, social conflict, wich have given dammage of social quality of life. Jakarta’s Governmen has give of solutions make to decission of problems solving by make of public areas in many area. The public space area (RPTRA) with more facilities to make of safety area for children, woman and old man. Jakarta Government policy think that RPTRA will give result to solve of social problem in Jakarta. As goodwill build of construct citizens by more programme in RPTRA so that have be urban resilience. In conclusion by constuct build of public space area have make up of quality the people in Jakarta. Methode for analysis is by according of spatial rule area from nationality level until district area levels based of teory of urban resilience that The Public Space Area is tool for help the people to develop capacity social and to make of Jakarta are comfort for children.

Keyword: *The Public Space Area, Resilience, spatial planning.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu wilayah pada perkotaan memerlukan suatu perencanaan. DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, memiliki dinamika dalam hal perencanaan ruang. Menurut Akhadi (2014), kegiatan pembangunan yang berkembang pesat sebagai imbas penerapan teknologi modern pada industri, menghasilkan perubahan kondisi lingkungan terutama komposisi udara. Komponen biosfer mengalami beban akibat banyaknya polutan yang dilepaskan dari permukaan Bumi, keadaan tersebut diperparah seiring berkurangnya RTH yang salah satu fungsi sebagai sarana ekologi dalam menyediakan oksigen dan menetralkan kadar polusi. Kurangnya lahan resapan air, ruang terbuka hijau, ruang terbuka bagi publik maupun ruang edukasi yang umum bisa dimanfaatkan bagi siapa saja menjadi suatu masalah bagi kehidupan sosial masyarakat Jakarta sebagai dampak keadaan lingkungan fisik tersebut. Keadaan terbangun saat ini dari lingkungan fisik yang ada memiliki dampak sosial yang menjadi masalah seperti, kurangnya lahan bagi anak-anak bermain, tidak adanya ruang bebas untuk berolahraga bagi masyarakat, serta tidak adanya ruang terbuka publik bagi interaksi sesama masyarakat setempat (P2TP2A, 2013).

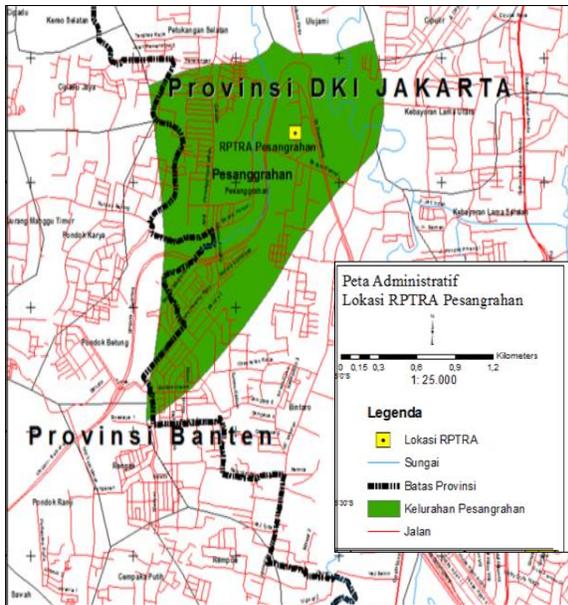
Lokasi penelitian terletak pada Kelurahan Pesanggrahan sebagai salah satu kelurahan yang dipilih untuk dibangun RPTRA. Kelurahan Pesanggrahan berada didalam wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Kelurahan ini terletak diperbatasan antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten (Gambar 1.1). Letak Kelurahan Pesanggrahan yang berada disisi selatan Jakarta, menjadikan kelurahan ini sebagai kelurahan yang terdepan dengan provinsi lain sehingga kesan kelurahan yang berada didalam ibukota dan kota metropolitan tidak terlalu menonjol terlihat.

Area *rural urban* yang merupakan pinggiran Provinsi Jakarta menjadikan kawasan ini terbangun diantara asimilasi dan kultur pinggiran kota walaupun secara administrasi dan pelayanan dikelola oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan. Melihat fakta kondisi yang ada maka perlunya dibangun suatu area yang khas sebagai simbol eksistensi Jakarta Kota Metropolitan, namun berkultur lingkungan dan ramah anak yaitu RPTRA (Tim Pemetaan Sosial RPTRA UHAMKA, 2015).

Salah satu upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak adalah dengan membuat RPTRA yang dibuat di setiap kecamatan di seluruh DKI Jakarta. Mengacu pada kondisi lingkungan fisik dan sosial yang ada dan telah dicanangkanya DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak, Pemda DKI Jakarta merumuskan suatu perencanaan pembangunan fisik suatu ruang dalam penataan lingkungan fisik dan sosial. Permulaan gagasan RPTRA ini muncul, saat ada pertemuan PKK yang menginginkan adanya tempat pemberdayaan perempuan dan anak yang sifatnya multifungsi. Akhirnya tersepakati/dirumuskan dengan sebutan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).(Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2015).

Perencanaan keruangan senantiasa fokus dalam menghubungkan dimensi keruangan pada kebijakan sektoral berbasis strategi kewilayahan. Kebanyakan di banyak negara dalam merencanakan keruangan mengacu kepada strategi perencanaan jangka panjang dan menengah untuk wilayah, kesepakatan penggunaan lahan dan pembangunan fisik sebagai kebijakan dan kordinasi pemerintah untuk

bidang transportasi, pertanian dan lingkungan (Djunaedi. A, 2013).



Gambar 1.1: Lokasi Penelitian

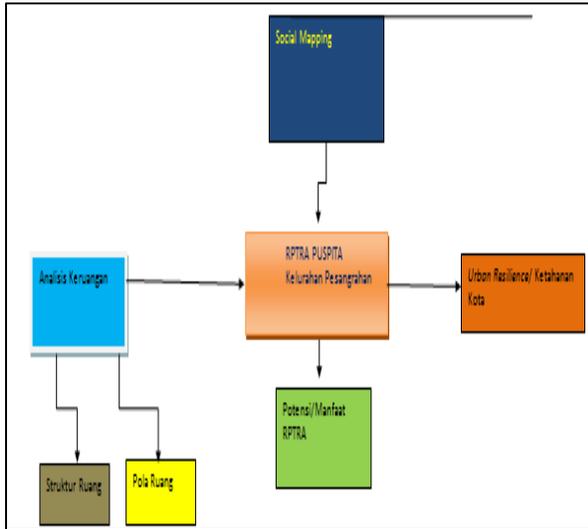
Pembangunan fisik sebagai kebijakan Perencanaan Keruangan juga dianggap memiliki ragam pengertian, kebanyakan pengamat sepakat bahwa perencanaan keruangan berperan dalam membentuk pola perekonomian, sosial kultur sertadimensi ekologi (Allmendinger. P and Haughton. G, 2010). *Resilience* didefinisikan dalam wujud yang berbeda yaitu kapasitas. Pada penggunaannya yang sering digunakan sebagai kapasitas dalam menghadapi tekanan terhadap bahaya sehingga mampu memulihkan keadaan dalam waktu cepat sebaga dampaknya. Menurut Fleischhauer (2008), *Urban Resilience* memiliki makna ketahanan perkotaan, yang dimaksud pengelolaan ketahanan perkotaan. Ketahanan perkotaan dari risiko dalam perspektif perencanaan keruangan memiliki tiga unsur yaitu: a. struktur lingkungan fisik; b. Struktur sosial ekonomi; c. Struktur kelembagaan. Unsur-

unsur tersebut memiliki potensi dalam berbagai hal seperti kebencanaan, pembangunan sosial, termasuk pusat korninasi kelembagaan. Berdasarkan itu, dapat disimpulkan pengelolaan *Urban Resilience* merupakan wujud peran dalam bentuk kemampuan dalam menghadapi suatu keadaan dalam permasalahan di perkotaan (*Urban City*).

Berdasarkan Peraturan Gubernur no 196 tahun 2015, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2015). Tujuan dari penelitian ini mengetahui Analisis spasial dari hasil pemetaan sosial dari pembangunan RPTRA dengan pendekatan aspek teori ketahanan masyarakat.

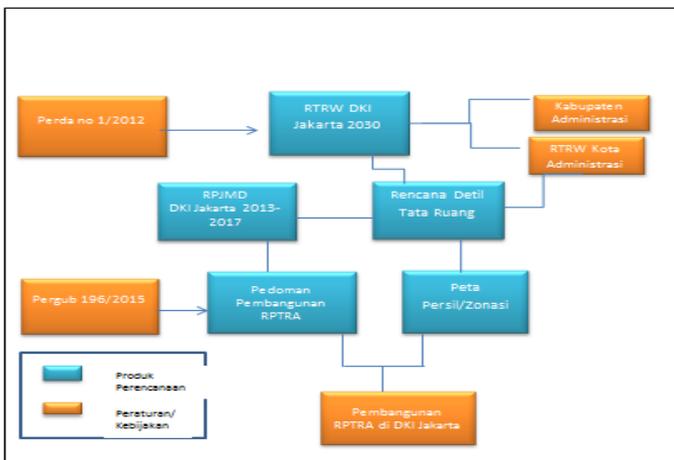
II. METODE

Metode yang digunakan menggunakan desain pendekatan kualitatif dengan melakukan metode deskripsi. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dapat menceritakan tentang keberadaan ruang dan bangunan RPTRA sebagai obyek penelitian, terhadap lingkungan sekitar dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan RPTRA Puspita di Kelurahan Pesanggrahan sebagai responden. Penggambaran obyek penelitian menggunakan hasil data lapangan dan didukung gambar serta hasil survey di masyarakat dengan validasi data mengacu pada data keruangan Kota Jakarta Selatan. Gambar Alur Penelitian disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Alur Penelitian

Tata ruang adalah produk hukum sebagai kebijakan pengelola suatu wilayah. Produk perencanaan keruangan tersebut memiliki ketetapan atau legalitas hukum sebagai bagian kebijakan pemerintahan setempat. Produk keruangan ini dianalisis dengan teori struktur ruang dan pola ruang dengan mencari kemungkinan potensi (Gambar 2.2).



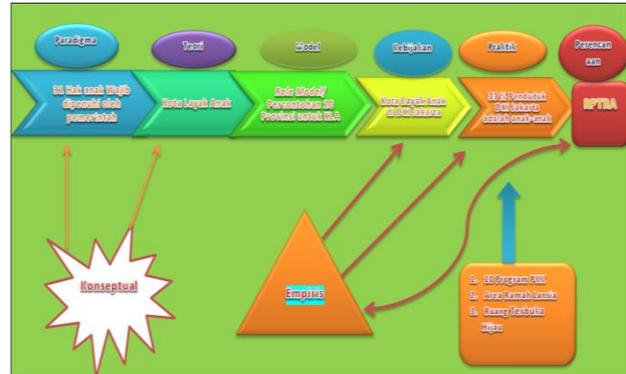
Gambar 2.2: Struktur dan Pola Ruang

III. HASIL PENELITIAN

Analisis Spasial Keruangan

Konsep keruangan telah diatur dalam sebuah proses. Berdasarkan kajian teoritis dan peraturan konsep keruangan yaitu

berwujud tata ruang sebagai hasil dari suatu perencanaan keruangan hasil kesepakatan ragam pihak yang diamanahkan kepada pemerintahan suatu wilayah (Gambar 3.1).



Gambar 3.1: Konsep Keruangan

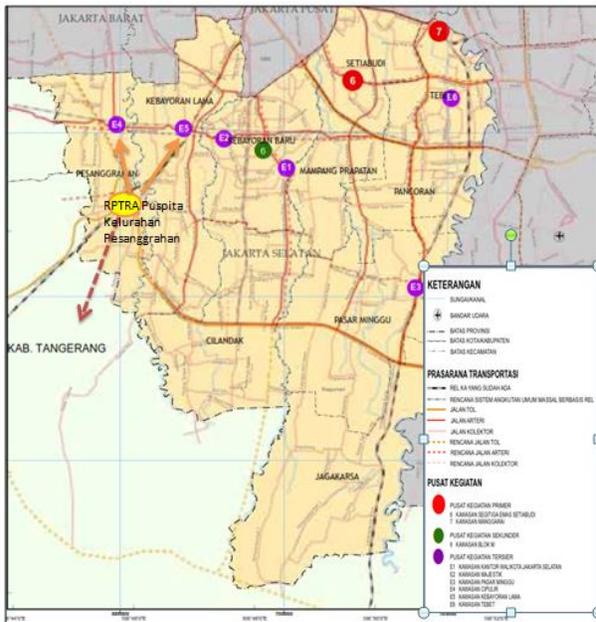
1. Struktur Ruang

Sebagai wujud struktur ruang Berdasarkan Peraturan Daerah no 1 tahun 2012, tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030. Struktur ruang merupakan susunan dari beberapa konsentrasi permukiman dengan jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi dalam mendukung kegiatan masyarakat bersifat hierarkis fungsional (Pemda DKI Jakarta, 2012).

Lokasi RPTRA Kelurahan Pesanggrahan yang ditandai pada (gambar 3.2) menunjukkan RPTRA Puspita yang berada di wilayah administratif Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan berada jauh dari pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat yaitu dari pusat kegiatan Primer (Setiabudi dan Manggarai), Sekunder (Blok M), dan Tersier. Kondisi tersebut jika tidak dikelola dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik akan lebih mendorong kegiatan masyarakat melalui wilayah Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten) dibandingkan ke kawasan-kawasan tersier, sekunder atau primer. RPTRA Puspita Kelurahan Pesanggrahan membangun embrio pusat kegiatan sosial masyarakat

sebagai unsur ketahanan kota menyikapi perkembangan kawasan disekitar DKI Jakarta dalam hal ini Provinsi Banten.

Kondisi eksis RPTRA Puspita di Kelurahan Pesanggrahan dengan beberapa wilayah, letak RPTRA Puspita cenderung dekat dengan kawasan tersier Cipulir dan Kebayoran Lama. Kondisi eksis dari RPTRA Puspita Kelurahan Pesanggrahan yang berada di perbatasan antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten dapat berpotensi untuk menjadi embrio area ketahanan dalam aspek ekonomi dengan mudahnya akses jalan raya dan kereta api (Stasiun Bintaro).



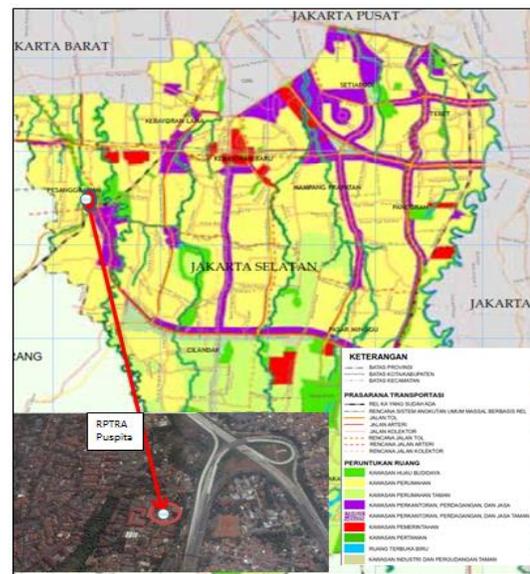
Gambar 3.2: Lokasi RPTRA

2. Pola Ruang

Pola Ruang di Jakarta Selatan terutama pada Kelurahan Pesanggrahan jika diinterpretasikan dari peta pola ruang menunjukkan kawasan hijau budidaya, dengan kondisi eksis pada dominan kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi. Kondisi faktual RPTRA Puspita terletak ditengah kawasan pemukiman

dengan kepadatan tinggi. Kondisi lingkungan terbangun dan merupakan bagian terdepan dari wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap wilayah Kabupaten Tangerang, menjadi kesan wilayah terpinggirkan dan menjadi wilayah interaksi dari dua wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten atau disebut dengan Sub Urban.

RPTRA Puspita sebagai bagian dari peruntukan ruang terbuka terbuka hijau dan di budidayakan sebagai sarana pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan dengan fungsi sebagai sarana olahraga, rekreasi dan sosial bagi masyarakat sehingga memiliki nilai ekologi, sosial dan estetis. RPTRA Puspita di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan menjadi salah satu hasil dari turunan produk rencana tata ruang dalam fungsi kawasan ruang terbuka hijau dan dibudidayakan. Hal ini berpotensi sebagai model penataan kawasan pemukiman dengan kepadatan tinggi.



Gambar 4.8 RPTRA terhadap Keruangan (sumber: RTRW DKI Jakarta 2030 diolah dari berbagai sumber)

Gambar 3.3: Peta Pola Ruang

3. *Resilience*

Ketahanan perkotaan lebih kepada kemampuan menghadapi risiko dalam perspektif perencanaan keruangan memiliki tiga unsur yaitu: a. struktur lingkungan fisik; b. struktur sosial ekonomi; c. struktur kelembagaan. Unsur-unsur tersebut memiliki potensi dalam berbagai hal seperti kebencanaan, pembangunan sosial, termasuk pusat kordinasi kelembagaan. Godschalk memberikan karakter *resilience* (ketahanan) seperti:

1. Redudansi, masukan dan informasi untuk memastikan dugaan permasalahan/ hal terburuk terjadi (dalam dugaan kebencanaan).
2. Diversitas; ragam pola yang ada untuk menanggulangi permasalahan yang ada.
3. Efisiensi; pola dan struktur yang sederhana sehingga kebermanfaatannya baik.
4. Otonomi: kapasitas dalam mengatur bentuk ketahanan.
5. Kekuatan; daya untuk menghadapi permasalahan kota.
6. Interdependensi; yaitu ketergantungan dalam pengelolaan atau interoperabilitas pengelolaan sehingga terpadu.
7. Adaptasi ; kapasitas dalam menyesuaikan antar stakeholder/yang berkepentingan.
8. Kolaborasi; multi kesempatan untuk partisipasi para pemilik kepentingan kota.

Berdasarkan pola ruang Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perda nomor 1/2012), RPTRA Puspita terbangun dikawasan hijau budidaya. Berdasarkan hasil pemetaan sosial, Keberadaan RPTRA Puspita juga dapat menjadi pelopor restorasi area disekitar secara eksis yang sudah terbangun dengan kepadatan tinggi untuk mengikuti penerapan pola ruang yaitu kawasan hijau. Mengacu pada

peraturan tata ruang dan wilayah maka penerapan pembangunan untuk kawasan hijau dapat dengan memanfaatkan RPTRA Puspita sebagai area contoh ruang hijau dan lebih dari 70 % ruang di RPTRA Puspita hijau. Adanya ruang hijau yang cukup menjadi area serapan air terutama saat terjadinya presipitasi air hujan, sehingga hasil presipitasi menjadi air tanah dalam waktu cepat dan dapat mengurangi terjadinya genangan/limpasan air di sekitar pemukiman. Morfologi dilingkungan terbangun RPTRA Puspita cenderung dengan ketinggian topografi yang berbeda. Penerapan kawasan hijau membantu mengurangi risiko bencana banjir, yang sering terdampak dikawasan yang lebih rendah topografinya (terutama akibat luapan Kali Pesanggrahan) dibandingkan di sekitar RPTRA Puspita.

Pada aspek sosial ekonomi RPTRA Puspita sesuai fungsi memiliki potensi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Keberadaan RPTRA Puspita sebagai representasi pembangunan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan mendukung DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak. Lokasi dengan kepadatan ruang terbangun yang tinggi menandakan tinggi populasi masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam interaksi sosial sesuai dengan kategori usia dan gender.

RPTRA Puspita menjadi gugus ruang terdepan di Kelurahan Pesanggrahan dalam hal ini DKI Jakarta terhadap pembangunan sosial dnegan provinsi Banten yaitu Kabupaten Tangerang. RPTRA Puspita sebagai wujud endukung Jakarta Kota Layak anak dengan menjadikan RPTRA Puspita sebagai area bermain dan belajar, bagi anak-anak seusia dengan teman sebaya yang aman dan ramah lingkungan. Kondisi hadir dan ramainya masyarakat usia anak-anak menggunakan RPTRA, diharapkan

kembang tumbuh anak secara fisik dalam interaksi sosial dan secara psikologis menjadi baik bahkan unggul. Hal tersebut disebabkan karena terbiasanya anak-anak dalam bermain yang positif yaitu permainan dan olahraga termasuk belajar sambil bermain.

IV. KESIMPULAN

Salah satu wujud dari pengejawantahan Kota Layak Anak melalui pembangunan RPTRA disejumlah wilayah di DKI Jakarta. Pembangunan RPTRA juga diakibatkan banyaknya permasalahan sosial yang disebabkan penataan wilayah yang belum relevan, sehingga menghasilkan masalah-masalah turunan seperti kurang berkembangnya anak dalam interaksi sosial yang berdampak pada kualitas hidup di Jakarta. Hasil kajian

pembangun ruang publik, telah meningkatkan kualitas masyarakat di Jakarta. RPTRA Puspita sebagai bagian dari peruntukan ruang terbuka terbuka hijau dan ruang budidaya sebagai wujud pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan dengan fungsi sebagai sarana olahraga, rekreasi dan sosial bagi masyarakat sehingga memiliki nilai ekologi, sosial dan estetis. RPTRA Puspita di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan menjadi salah satu hasil dari turunan produk rencana tata ruang dalam fungsi kawasan ruang terbuka hijau dan budidaya yang sesuai terhadap fungsi peruntukan sesuai dengan rencana pembangunan kota dan peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah.



Gambar : RPTRA pada Lingkungan Fisik

DAFTAR PUSTAKA:

- Akhadi, M. 2014. *Isu Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Allmendinger, P and Haughton, G, 2010. *Spatial Planning, Devolution, and New Planning Spaces. Environment and Planning C: Government and Policy* .Vol 28 P 803-818.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 209.
- Djunaedi, Ahmad. 2013. *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fleischhauer, Mark. 2008. *The Role of Spatial Planning in Strengthening Urban Resilience*. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2008
- Pasalbessy, Jhon, 2010. *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya*. *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2015. *Ruang Publik Terpadu Ramah anak*.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2015. *Peraturan Gubernur no 196 Tahun 2015*.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2012. *Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2012*.
- Taryana, Didik. 1996. *Konsep Geografi*. *Jurnal Pendidikan Geografi UM*. *Jurnal Pendidikan Geografi* Vol.1.1996. Malang. Vol 3, No 1 (1996) > Taryana *Jurnal Pendidikan Geografi UM*.
- Yunus, H, Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- (<http://pena.gunadarma.ac.id>)